

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL TEKNIK INFORMASI	No. Dokumen	Instrumen/Untrim-AMI//9/2025
		Berlaku Sejak	2025
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal :	Auditee:
Waktu :	Auditor
Prodi :	a. Ketua :
Jumlah Dokumen :	b. Anggota :
Acuan:	c. Anggota :

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 53 Tahun 2023

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

No.	Referensi Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
Kriteria 1. Budaya Mutu							
1)	Budaya Mutu (Penetapan)	Ketersediaan kebijakan, standar, dan indikator terkait system tata kelola internal UPPS dan/ atau PT berikut SOP, yang mencakup administrasi akademik, keuangan, SDM, dan aspek lain dalam siklus PPEPP, ditingkat UPPS dan/atau PT.					
2)	Budaya Mutu (Penetapan)	Ketersediaan kebijakan, standar dan indikator terkait fungsi SPMI dengan SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.					
3)	Budaya Mutu (Pelaksanaan)	Efektifitas pelaksanaan kegiatan terkait standar dan indicator yang menunjukkan berfungsinya sistem tatakelola internal UPPS dan/ atau PT berikutSOP, yang mencakup administrasi akademik, keuangan, SDM, dan aspek lain dalam					

		siklus PPEPP, ditingkat UPPS dan/atau PT. Dokumen pendukung misalnyalaporan tahunan pimpinan UPPS dan/atau PT.					
4)	Budaya Mutu (Pelaksanaan)	Efektifitas pelaksanaan standar dan indikator yang menunjukkan berfungsinya SPMI dengan SDM yang kompetesebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT					
5)	Budaya Mutu (Evaluasi)	Efektifitas dan keberkelaan pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait Sistem Tata Kelola Internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup Administrasi Akademik, Keuangan, SDM, dan aspek lain di tingkat UPPS dan/atau PT.					
6)	Budaya Mutu (Evaluasi)	Efektifitas pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait fungsi SPMI dan SDM pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT					
7)	Budaya Mutu (Pengendalian)	Efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait sistem tata kelola internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup administrasi akademik, keuangan, sdm, dan aspek lain dalam siklus PPEPP di tingkat UPPS dan/atau PT.					
8)	Budaya Mutu (Pengendalian)	Efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait fungsi SPMI dan SDM Pelaksananya ditingkat PT/UPPS.					
9)	Budaya Mutu (Peningkatan)	Efektifitas peningkatan/ optimalisasi standar dan indikator terkait system tata kelola internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup administrasi akademik, keuangan, sdm, dan aspek lain dalam siklus PPEPP di tingkat UPPS dan/atau PT.					
10)	Budaya Mutu (Peningkatan)	Efektifitas peningkatan/ optimalisasi standar dan indikator terkait fungsi SPMI					

		dan SDM pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.					
Kriteria 2. Relevansi Pendidikan							
11)	Relevansi Pendidikan (Penetapan)	Ketersediaan kebijakan, standar dan indikator terkait DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: asal, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus					
12)	Relevansi Pendidikan (Penetapan)	Ketersediaan Kebijakan, standar dan indikator terkait isi pembelajaran dan rancangan kurikulum outcome-based education, yang mencakup <i>soft</i> dan <i>hard competence</i> (memenuhi KKNI level 6), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam penyusunannya.					
13)	Relevansi Pendidikan (Penetapan)	Ketersediaan Kebijakan, standar dan indikator tentang fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring, atau hibrida, CBL, PBL, micro-credential, rekognisi pembelajaran lampau (RPL) yang relevan dengan bidang keilmuan PS, Relevansi Pendidikan (Penetapan)					
14)	Relevansi Pendidikan (Penetapan)	Ketersediaan Kebijakan standar dan indikator terkait kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) serta sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional).					
15)	Relevansi Pendidikan (Pelaksanaan)	Efektifitas pelaksanaan kegiatan terkait DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: asal, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.					
16)	Relevansi Pendidikan (Pelaksanaan)	Efektifitas pelaksanaan Kegiatan terkait standar dan indikator tentang isi pembelajaran dan rancangan kurikulum outcome-based education, yang mencakup <i>soft</i> dan <i>hard competence</i> (memenuhi KKNI level 6), yang ditetapkan oleh					

		perguruan tinggi serta keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam penyusunannya					
17)	Relevansi Pendidikan (Pelaksanaan)	Efektifitas pelaksanaan Kegiatan terkait standar dan indicator tentang fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring, atau hibrida, CBL, PBL, micro-credential, rekognisi pembelajaran lampau (RPL) yang relevan dengan bidang keilmuan PS, penciptaan suasana akademik, dan penilaian pembelajara serta pemenuhan beban belajar.					
18)	Relevansi Pendidikan (Pelaksanaan)	Efektifitas pelaksanaan kegiatan terkait standar dan indicator tentang kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan dunia usaha, dunia industry dan dunia kerja (DUDIKA), serta sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional)					
19)	Relevansi Pendidikan (Evaluasi)	Efektifitas pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: tempat, suku, jenis kelamin) program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.					
20)	Relevansi Pendidikan (Evaluasi)	Efektifitas pelaksanaan Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait isi pembelajaran dan rancangan kurikulum outcome-based education, yang mencakup <i>soft</i> dan <i>hard competence</i> (memenuhi KKNI level 6), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam penyusunannya					
21)	Relevansi Pendidikan (Evaluasi)	Efektifitas pelaksanaan Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring, atau hibrida, CBL, PBL, micro credential, rekognisi pembelajaran lampau (RPL) yang relevan dengan bidang keilmuan PS, penciptaan					

		suasana akademik dan penilaian pembelajaran serta pemenuhan beban belajar					
22)	Relevansi Pendidikan (Evaluasi)	Efektifitas pelaksanaan Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), serta sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional).					
23)	Relevansi Pendidikan (Pengendalian)	Efektifitas pelaksanaan Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: tempat, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus					
24)	Relevansi Pendidikan (Pengendalian)	Efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait isi pembelajaran dan rancangan kurikulum outcome-based education, yang mencakup <i>soft</i> dan <i>hard competence</i> (memenuhi KKNI level 6), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam penyusunannya.					
25)	Relevansi Pendidikan (Pengendalian)	Efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan pemenuhan beban belajar misalnya: micro- credential, rekognisi pembelajaran lampau (RPL), atau pembelajaran di luar program studi.					
26)	Relevansi Pendidikan (Pengendalian)	Efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), serta sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional).					

27)	Relevansi Pendidikan (Peningkatan)	Efektifitas peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: tempat, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.					
28)	Relevansi Pendidikan (Peningkatan)	Efektifitas Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait isi pembelajaran dan rancangan kurikulum outcome-based education, yang mencakup <i>soft</i> dan <i>hard competence</i> (memenuhi KKNI level 6), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam penyusunannya.					
29)	Relevansi Pendidikan (Peningkatan)	Efektifitas peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan pemenuhan beban belajar, misalnya: micro-credential, rekognisi pembelajaran lampau (RPL), atau pembelajaran di luar program studi.					
30)	Relevansi Pendidikan (Peningkatan)	Efektifitas peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), serta sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional)					
Kriteria 3. Relevansi Penelitian							
31)	Relevansi Penelitian (Penetapan)	Kebijakan, standar dan indikator terkait sarana dan prasarana penelitian, pembiayaan penelitian, peta jalan penelitian dan pengembangan DTPR di bidang penelitian.					
32)	Relevansi Penelitian (Penetapan)	Ketersediaan Kebijakan, standar dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.					
33)	Relevansi Penelitian (Penetapan)	Ketersediaan Kebijakan, standar, dan indikator terkait perolehan hibah penelitian, kerjasama penelitian, publikasi baik lingkup lokal, nasional, dan					

		internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan penelitian.					
34)	Relevansi Penelitian (Pelaksanaan)	Efektifitas pelaksanaan Kegiatan terkait standar dan indikator tentang sarana dan prasarana penelitian, DTPR, dan pembiayaan penelitian, dan peta jalan penelitian.					
35)	Relevansi Penelitian (Pelaksanaan)	Efektifitas pelaksanaan Kegiatan terkait standar dan indikator tentang implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.					
36)	Relevansi Penelitian (Pelaksanaan)	Efektifitas pelaksanaan kegiatan terkait standar dan indikator tentang perolehan hibah penelitian, kerjasama penelitian, publikasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan penelitian					
37)	Relevansi Penelitian (Evaluasi)	Efektifitas pelaksanaan Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait sarana dan prasarana penelitian, DTPR, dan pembiayaan penelitian, dan peta jalan penelitian.					
38)	Relevansi Penelitian (Evaluasi)	Efektifitas pelaksanaan Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA.					
39)	Relevansi Penelitian (Evaluasi)	Efektivitas pelaksanaan Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait perolehan hibah penelitian, kerjasama penelitian, publikasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan penelitian.					
40)	Relevansi Penelitian (Pengendalian)	Efektifitas pelaksanaan Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait sarana dan prasarana penelitian, DTPR, dan pembiayaan penelitian, dan peta jalan penelitian.					

41)	Relevansi Penelitian (Pengendalian)	Efektifitas pelaksanaan Tindak lanjut asil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi, misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.					
42)	Relevansi Penelitian (Pengendalian)	Efektifitas pelaksanaann tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait perolehan hibah penelitian, kerjasama penelitian, publikasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan penelitian.					
43)	Relevansi Penelitian (Peningkatan)	Efektifitas Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait sarana dan prasarana penelitian, DTPR, dan pembiayaan penelitian, dan peta jalan penelitian.					
44)	Relevansi Penelitian (Peningkatan)	Efektifitas Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator erkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.					
45)	Relevansi Penelitian (Peningkatan)	Efektifitas Peningkatan/optimalis asi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait perolehan hibah penelitian, kerjasama penelitian, publikasi baiklingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan penelitian.					

Kriteria 4. Relevansi PKM

46)	Relevansi PKM (Penetapan)	Ketersediaan Kebijakan, standar dan indikator terkait sarana dan prasarana PkM, DTPR, dan pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran).					
47)	Relevansi PKM (Penetapan)	Kebijakan, standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi, misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.					

48)	Relevansi PKM (Penetapan)	Kebijakan, standar, dan indikator terkait perolehan hibah PkM, kerjasama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM					
49)	Relevansi PKM (Pelaksanaan)	Efektifitas pelaksanaan kegiatan terkait standar dan indikator tentang sarana dan prasarana PkM, DTPR, dan pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran).					
50)	Relevansi PKM (Pelaksanaan)	Efektifitas pelaksanaan kegiatan terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.					
51)	Relevansi PKM (Pelaksanaan)	Efektifitas pelaksanaan Kegiatan terkait standar dan indikator tentang perolehan hibah PkM, kerjasama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM					
52)	Relevansi PKM (Evaluasi)	Efektifitas pelaksanaan Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait sarana dan prasarana PkM, DTPR, dan pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran).					
53)	Relevansi PKM (Evaluasi)	Efektifitas pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.					
54)	Relevansi PKM (Evaluasi)	Efektifitas pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait perolehan hibah PkM, kerjasama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM.					
55)	Relevansi PKM (Pengendalian)	Efektifitas pelaksanaan Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian terkait sarana dan prasarana PkM, DTPR, dan pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran).					

56)	Relevansi PKM (Pengendalian)	Kebijakan, standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.					
57)	Relevansi PKM (Pengendalian)	Efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian terkait perolehan hibah PkM, kerjasama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM					
58)	Relevansi PKM (Peningkatan)	Efektifitas peningkatan/optimalis asi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait sarana dan prasarana PkM, DTPR, dan pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran).					
59)	Relevansi PKM (Peningkatan)	Efektifitas Peningkatan/optimalis asi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.					
60)	Relevansi PKM (Peningkatan)	Efektifitas Peningkatan/optimalis asi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait perolehan hibah PkM, kerjasama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM.					
Kriteria 5. Akuntabilitas							
61)	Akuntabilitas (Penetapan)	Kebijakan, standar dan indikator terkait sistem tata kelola yang otonom secara transparan, dan akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional					
62)	Akuntabilitas (Penetapan)	Ketersediaan Kebijakan, standar dan indikator terkait audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana dan SDM yang profesional.					
63)	Akuntabilitas (Pelaksanaan)	Efektifitas pelaksanaan standar dan indikator tentang sistem tata kelola yang otonom yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional.					

64)	Akuntabilitas (Pelaksanaan)	Efektifitas pelaksanaan standar dan indikator terkait audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana dan SDM yang profesional.					
65)	Akuntabilitas (Evaluasi)	Efektifitas pelaksanaan Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait sistem tata kelola yang otonom secara transparan, dan akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional					
66)	Akuntabilitas (Evaluasi)	Efektifitas pelaksanaan Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana dan SDM yang profesional.					
67)	Akuntabilitas (Pengendalian)	Efektifitas pelaksanaan Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait sistem tata kelola yang otonom secara transparan, dan akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional.					
68)	Akuntabilitas (Pengendalian)	Efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana dan SDM yang profesional.					
69)	Akuntabilitas (Peningkatan)	Efektifitas Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait sistem tata kelola yang otonom secara transparan, dan akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional					
70)	Akuntabilitas (Peningkatan)	Efektifitas Peningkatan/optimalis asi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana dan SDM yang profesional.					
KRITERIA 6. DIFERENSIASI MISI							
71)	Diferensiasi Misi (Penetapan)	Ketersediaan Kebijakan, standar dan indikator terkait tridarma perguruan tinggi yang mencakup VMTS, rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat Menggambarkan ciri khas keilmuan PS serta pengakuan/apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA ditingkat					

		lokal, nasional, dan internasional.					
72)	Diferensiasi Misi (Pelaksanaan)	Efektifitas Pelaksanaan standar dan indikator terkait tridarma perguruan tinggi yang mencakup VMTS, rencana pengembangan strategi UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS, serta pengakuan/apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA ditingkat lokal, nasional, dan internasional.					
73)	Diferensiasi Misi (Evaluasi)	Efektifitas pelaksanaan Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait tridarma perguruan tinggi yang mencakup VMTS, rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS, serta pengakuan/apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA ditingkat lokal, nasional, dan internasional.					
74)	Diferensiasi Misi (Pengendalian)	Efektifitas pelaksanaan Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait tridarma perguruan tinggi yang mencakup VMTS, rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS, serta pengakuan/apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA di tingkat lokal, nasional, dan internasional.					
75)	Diferensiasi Misi (Peningkatan)	Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait tridarma perguruan tinggi yang mencakup VMTS, rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS, serta pengakuan/ apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA di tingkat lokal, nasional, dan internasional.					

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Auditee,

Jembrana,

Ketua Tim Auditor,

()

()